

# Laporan Akuntabilitas Kinerja



**TRIWULAN 4**

---

**2019**

---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan 4 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoiNya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 17 Januari 2020



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Daftar Bagan .....	vi
Bab. I   Pendahuluan.....	8
1.1. Latar Belakang .....	8
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandalajati.....	9
1.3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mandalajati .....	11
1.4. Isu Strategis .....	27
1.5. Landasan Hukum.....	29
1.6. Teknik Pengumpulan Data serta Monitoring dan Evaluasi .....	29
1.7. Sistematika.....	30
Bab. II   Perencanaan Kinerja.....	32
2.1. Rencana Strategis.....	32
2.2. Tujuan dan Sasaran .....	33
2.3. Indikator Kinerja Utama .....	34
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	36
2.5. Perencanaan Anggaran Tahun 2019 .....	37
Bab. III   Akuntabilitas Kinerja Triwulan IV Tahun 2019 .....	38
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2019 .....	38
3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Triwulan IV Tahun 2019.....	41
3.2.1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.....	44

3.2.2.	Sasaran 2 : Meningkatnya peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan .....	47
3.2.2.	Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.....	50
Bab. IV	Penutup.....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Janji Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih.....	5
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung .....	34
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 ....	35
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019.....	36
Tabel 2.4	Anggarann Tahun 2019.....	37
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.....	40
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 Triwulan IV .....	41
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 .....	42
Tabel 3.4	Pencapaian Target Misi .....	42
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	42
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran I Triwulan IV Tahun 2019 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati.....	44
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran II Triwulan IV Tahun 2019 Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan .....	47
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran III Triwulan IV Tahun 2019 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kecamatan Mandalajati .....	10
Gambar 1.2	SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 .....	30

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Jumlah RT dan RW Se Kecamatan Mandalajati .....	11
Bagan 1.2	Struktur Organisasi Kecamatan Mandalajati .....	12
Bagan 1.3	Pelimpahaan Pelaksanaan Kewenangan Walikota Bandung Kepada Camat..	14



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2019 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019, LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai





tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi d

aerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mandalajati Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandalajati**

Kecamatan Mandalajati merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Mandalajati oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Jatihandap
2. Kelurahan Karang Pamulang

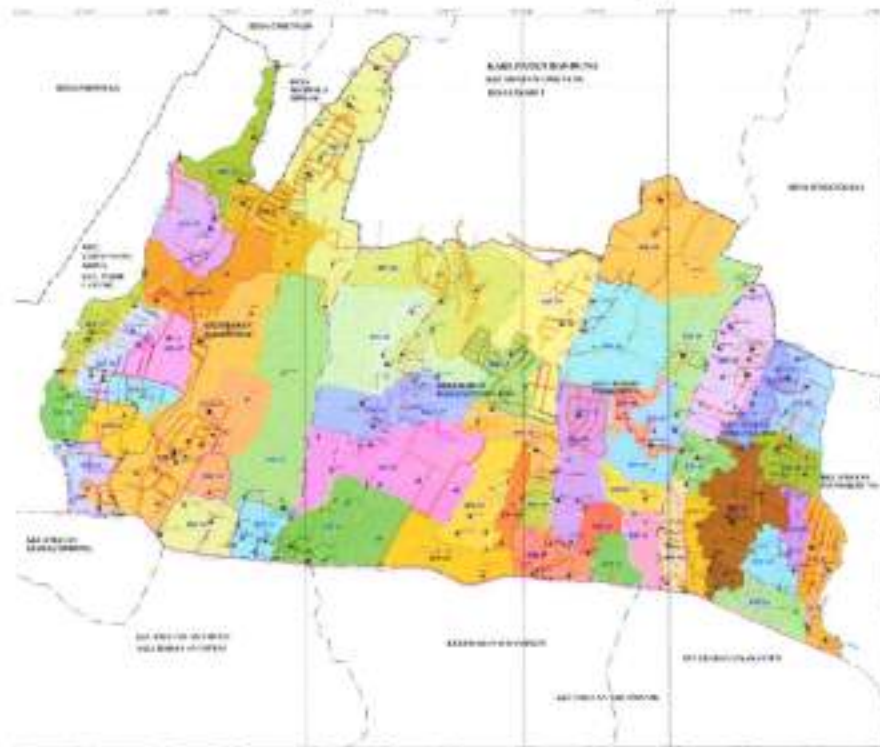


3. Kelurahan Pasir Impun
4. Kelurahan Sindangjaya

Berdasarkan peta wilayah, batas-batas wilayah Kecamatan Mandalajati adalah sebagai berikut :

1. Utara : Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung
2. Selatan : Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Antapani
3. Barat : Kecamatan Cibeunying Kidul
4. Timur : Kecamatan Ujung Berung

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Kecamatan Mandalajati**



Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019.

Dengan adanya Surat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Tanggal 6 Desember 2017, maka Jumlah RT/RW sejak tahun 2018 mengalami penambahan 1 RW dan 7 RT, sebagai berikut :



Bagan 1.1  
Jumlah RT dan RW Se Kecamatan Mandalajati

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Jatihandap	17	117
2.	Karang Pamulang	13	71
3.	Pasir Impun	11	57
4.	Sindangjaya	12	60
Jumlah		53	312

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019.

### 1.3. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Mandalajati

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya menurut Pasal 3 mengenai Susunan Organisasi Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan Mandalajati terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.



Bagan 1.2  
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANDALAJATI



Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019

Menurut Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016, Kecamatan mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di kecamatan;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;



10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat, ada 26 urusan yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung kepada Camat Mandalajati, yaitu :



Kecamatan Mandalajati

Bagan 1.3  
Pelimpahan Pelaksanaan Kewenangan Wali Kota Bandung Kepada Camat

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
1.	Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.</li><li>2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.</li><li>3. Perbaikan Gizi Keluarga dan Masyarakat</li><li>4. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.</li><li>b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.</li></ol> <p>Mengoordinasikan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.</p> <p>Fasilitasi Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga.</p> <p>Pemberian surat keterangan domisili dalam rangka pendirian dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan.</p>	Dinas Kesehatan



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
2.	Bidang Pekerjaan Umum	5. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.	Pertinaan dan fasilitas Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).	Dinas Pekerjaan Umum
		6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya pelayanan Kesehatan Masyarakat	
3.	Bidang Penataan Ruang Dan Pemukiman	4. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota (serta bangunan pelengkap jalan kota).	a. Pengusulan penanganan kebinatangan dan sumber daya air yang menjadi kewenangan kota (PUU, jalan, sungai, trotoar, saluran drainase jalan); dan b. Koordinasi dan fasilitasi sarana prasana tanaman ditrotoar. Monitoring pemanfaatan ruang milik jalan dan sepadan sungai.	Dinas Penataan Ruang
		2. Pengawasan pemarta ruang dan milik jalan oleh pihak tertentu	a. Koordinasi dan pelaksanaan pembersihan saluran drainase, jalan, batu jalan, trotoar, pada jalan Kota diwilayah Kecamatan; dan b. Koordinasi dan pengecatan kerb trotoar yang menjadi kewenangan kota pada Kecamatan yang bersangkutan.	
		3. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasana dan sarana drainase diwilayah.	a. Fasilitasi pematasaan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. b. Fasilitasi pemberian reklame insidentil, yaitu spanduk, poster, selebaran piarphet dan umbul-umbul liar. Fasilitasi pemberian pemukiman.	
		1. Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan tata ruang.		
		2. Penyelenggaraan, Pengelolaan Pemukiman.		



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPANKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
4.	Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Perencanaan	Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum dalam skala ringan antara lain pemeliharaan drainase dan jalan lingkungan, pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi (MCK+TSK, Septictank, sumbu infitras/sumbu resapan, sarana penyediaan air minum/SPAM, penyediaan sarana air bersih/SAB, pemeliharaan penerangan jalan lingkungan, penyediaan biopori).</li><li>2. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum yaitu taman lingkungan, taman bermain anak.</li></ol>	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Perencanaan
5.	Bidang Perumahan Dan Perencanaan	Monitoring dan Pembinaan Perolehan Tanah (Pengadaan Umum), Untuk Kepentingan Umum).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta penilaian status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>2. Pelaksanaan inventarisasi aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.</li></ol>	
6.	Bidang Sosial Dan Aspek Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial Skala Kota.</li><li>2. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial Skala Kota.</li><li>3. Penanggulangan korban bencana Skala Kota.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembantuan surat keterangan domisili kesekretariatian pendataan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial dan yayasannya yang bergerak dalam bidang sosial.</li><li>b. Pembantuan rekomendasi personil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Garda Pertugas Pendamping Kesejahteraan Sosial (PKKS).</li></ol> <p>Rekapitulasi, verifikasi dan validasi data penugasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penosngahan dan penanggulangan pertama bencana dan pengungsi lingkup Kecamatan.</li></ol>	Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan





Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
7.	Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1. Pembinaan dan pemertipatan tenaga kerja dalam negeri. 2. Pembinaan Ketenagakerjaan. 3. Pembinaan Ketransmigrasian.	2. Pelaksanaan pertantuan daerah rawan bencana lingkup Kecamatan.	Dinas Tenaga Kerja
			3. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGAMA).	
			Pengawasan pendistribusian beras miokrin di wilayah Kecamatan.	
			4. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang Skala Kota.	
			5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial tertular yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu Skala Kota.	
8.	Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB	1. Kelolaikan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penganngulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak.	a. Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			b. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Forum Pos Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan.	
			c. Penetapan Paguyuban Metode Operasi Pria (MOP) lingkup Kecamatan.	
			d. Fasilitas terhadap penilaian peserta KB Lestari Teladan.	



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
9.	Bidang Pangan	<p>1. Penanganan dan penyuluhan pangan untuk kelompok rawan pangan Skala Kota.</p> <p>2. Peningkatan dan pemantauan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p>3. Identifikasi kelompok rawan pangan.</p>	<p>2. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seks (IMS) dan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seks (IMS) dan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.</p>	<p>Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) lingkup Kecamatan.</p> <p>Pengusulan Pengadaan prasarana dan sarana kawasan rumah pangan lestari</p> <p>Rekapitulasi Pendataan Kelompok Rawan Pangan</p>



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		4. Pembinaan dan pengawasan mutu dan kesamaan produk pangan masyarakat. 5. Pembinaan pengembangan pengendalian konsumsi Pangan masyarakat 6. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat	Pembinaan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan.  Rekapitulasi informasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	
10.	Bidang Pertanian	Peneleapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi.	a. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penghijauan kota. b. Pembinaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Urban Farming. c. Fasilitas sarana dan prasarana Urban Farming. d. Pengawasan terhadap keberadaan hewan liar. e. mengkoordinasi terhadap peredaran dan penggunaan peesada wilayah Kecamatan.	
11.	Bidang Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup skala Kota. 2. Penerapan Dokumen Lingkungan.	Peringkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup kecamatan  a. Fasilitas pengawasan lapangan penerapan dokumen lingkungan. b. Fasilitas pengawasan lapangan pelaksanaan kegiatan konservasi lingkungan. c. Pendataan dan penyebaran informasi	Dasar Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPYHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
12.	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3. Penyelenggaraan persampahan skala Kota.  1. Penyelenggaraan pelayanan Pendaftaran Penduduk.  2. Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil.	a. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghitungan, pembuatan surat resapan dan biopori lingkup Kecamatan. b. Pengadaan tempat sampah rumah lingkungan, pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan. c. Fasilitas pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah. d. Fasilitas pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah. e. Fasilitas dan koordinasi pengangkutan dan pengadaan petugas kebersihan (sampah, gorong-gorong, dan lain-lain) di kewilayahan dan Lingkungan RW. f. Fasilitas gerakan dan lingkungan bebas sampah.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13.	Bidang Perhubungan	Pemeriksaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, Marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat	a. Perantangan surat keterangan kelahiran WNI dan orang asing b. Pembuatan surat keterangan lahir mail. Pembuatan surat keterangan kematian. a. Pengujian pemasangan rambu rambu lalu lintas, dan portal. b. Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) dan kendaraan tidak bermotor di lingkungan	Dinas perhubungan



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
14.	Bidang Komunikasi Dan Informatika	Pengendalian pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.	Kecamatan: c. Fasilitas sarana dan pelaksanaan pemberian parkir liar. d. Pengaturan gembok kendaraan parkir liar. e. Fasilitas dan koordinasi bantuan pengalutiran kemacetan lalu lintas (khususnya persinggangan jalan). a. Perencanaan, penyajian dan pengembangan TIK Kecamatan. b. Penyajian SDM TIK untuk kebutuhan TIK Kecamatan. c. Pendataan menara telekomunikasi. d. Pendataan dan pelaporan warner dari atau usaha jasa TIK lainnya. e. Pelayanan pengaduan masyarakat.	Bidang Komunikasi Dan Informatika
15.	Bidang Statistik	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup data dan statistik.	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan data dan statistik lingkup Kecamatan.	Bidang Statistik
16.	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah	1. Pembetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kota. 2. Fasilitas pelaksanaan pengesahan akta pendirian koperasi dalam wilayah Kota.	a. Penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang mengajukan bantuan modal UMKM. b. Rekomendasi penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang akan mengajukan tanda pengenal berjualan. c. Rekomendasi pengajuan bantuan modal bagi koperasi dan UMKM. a. Penerbitan surat keterangan domisili koperasi. b. Rekapitulasi pendataan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
17.	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3. Perjawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah (KUKM) dalam wilayah Kota.	a. Pendaftaran Pedagang Kaki Lima (PKL). b. Pembentukan forum Pedagang Kaki Lima (PKL).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.	Bidang Kepemanduan Dan Olahraga	1. Pembinaan terhadap upaya organisasi kepemudaan. 2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. 3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	Pembinaan organisasi kepemudaan lingkup Kecamatan. Pembinaan kegiatan kepemudaan lingkup Kecamatan. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan lingkup Kecamatan.	Dinas Pemuda dan Olah Raga
19.	Bidang Kebudayaan	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota 2. Pelestarian tradisi yang masyarakat pengikutnya dalam Daerah Kota 3. Pembinaan lembaga adat yang pengikutnya dalam Daerah Kota 4. Pelaksanaan bidang kebudayaan 5. Pembinaan kesenian yang pelakunya masyarakat dalam Daerah Kota.	a. Pendaftaran dan inventarisasi objek dan sub objek tradisi pada lingkup Kecamatan. b. Rekomendasi pendirian sanggar seni lingkup kecamatan Penyelenggaraan diskusi/seminar/sarasehan dalam rangka pengembangan tradisi lingkup Kecamatan. Pendaftaran dan inventarisasi sanggar/lingkungan seni dan budaya serta pelaku seni budaya lingkup Kecamatan. Penyebarluasan informasi dalam rangka pelestarian objek tradisi lingkup Kecamatan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH	
20.	Bidang Pariwisata	6.	Pembinaan sejarah local daerah Kota.	Penyediaan Pengeluaran kesenian, pasanggrai dan pameran tradisi lingkup Kecamatan.	
		7.	Penetapan cagar budaya peringkat Kota.	Pendataan dan inventarisasi data lembaga adat dan pengannya pada lingkup Kecamatan.	
		8.	Pengelolaan cagar budaya peringkat Kota.	Usulan penetapan cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
		9.	Penerbitan izin cagar budaya ke luar Daerah Kota.	Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perorangan maupun badan usaha yang akan membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu provinsi.	
		10.	Pengelolaan museum Kota.	Pendataan dan inventarisasi kondisi cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
		1.	Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota.	Pendataan potensi pariwisata lingkup Kecamatan.	
		2.	Pengelolaan kawasan pariwisata	Penyelenggaraan kegiatan penguatan pasar pariwisata lingkup kecamatan.	
		3.	Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.	Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan lingkup kecamatan.	
		4.	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.		
		5.	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai	Pendataan potensi ekonomi Kecamatan	



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
20.	Bidang Pariwisata	6. Pembinaan sejarah local daerah Kota.	Penyelenggaraan Pergelaran keserian, pasanggih dan pameran tradisi lingkup Kecamatan.	
		7. Penetapan cagar budaya peringkat Kota.	Pendataan dan inventarisasi data lembaga adat dan pengaturannya pada lingkup Kecamatan.	
		8. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kota.	Usulan penetapan cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
		9. Pemberian izin cagar budaya ke luar Daerah Kota.	Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perorangan maupun badan usaha yang akan membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu provinsi.	
		10. Pengelolaan museum Kota.	Pendataan dan inventarisasi kondisi cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
		1. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota;	Pendataan potensi pariwisata lingkup Kecamatan.	
		2. Pengelolaan kawasan wisata	Penyelenggaraan kegiatan penguatan pasar pariwisata lingkup kecamatan.	
		3. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.	Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan lingkup kecamatan	
		4. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.		
		5. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai	Pendataan potensi ekonomi Kecamatan	





Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPYHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
21.	Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan	6. Pelaksanaan peningkatan kapasitas manusia sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.	Penetapan anggota Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) lingkup Kecamatan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Pengembangan Minat Baca	Facilitasi Penyelenggaraan partisipasisumbangan buku dari masyarakat.	
22.	Bidang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pengelolaan Kearsipan	Menyelenggarakan perpustakaan lingkup kecamatan.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, kelengkapan, pemangangan bencana skala Kota	a. Fasilitasi pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana. b. Fasilitasi sarana dan pembentukan forum relawan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya. c. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota d. Fasilitasi pengendalian, penataan dan pemeliharaan hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan. e. Fasilitasi pembentukan satuan tugas (SATGAS) Penegakkan Perda K3 lingkup Kecamatan.	
23.	Bidang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1. MenegakkanPeraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah	a. Pendataan dan pemetaan potensi pelanggaran Keterlibatan, Kebersihan dan Keindahan (K3) di lingkup Kecamatan. b. Fasilitasi dan konsultasi Petugas Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelanggaran Keterlibatan, Kebersihan dan Keindahan (K3) lingkup Kecamatan. c. Pembinaan barndirektame insidentil yang tidak mempunyai izin dan yang habis masa berlaku izinya skala Kecamatan.	Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Menyelenggarakan Keterlibatan Umum dan Keterlibatan Masyarakat		



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat	a. Perbaikan penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (Sikamling). b. Rekorisasi pengusulan pembuatan kartu tanda anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan. c. Fasilitas pelatihan anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan. a. Penyempalan prioritas usulan hasil Musrembang lingkup Kecamatan. b. Penyempalan laporan (per trawulan) atas capaian hasil pembangunan yang ada di Wilayah kerjanya, baik yang bersumber dari dana APBD maupun non APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
24.	Bidang Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Pembangunan Dan Fungsi Penunjang Penelitian Dan Pengembangan	Perencanaan		
25.	Bidang Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pengelolaan Pajak, Retribusi Dan Pendapatan Daerah Lain	1. Pelaksanaan pengelolaan pajak 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah	fasilitasi pengawasan operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal insentifisasi dan ekstensifikasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	Dinas Pelayanan Pajak
26.	Bidang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (menujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama interkamu, dina	a. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) lingkup Kecamatan. b. Pembentukan kampung toleransi. c. Pembentukan Forum Pertabaaran Kebangsaan (FPK). d. Pembentukan forum silaturahmi umat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPYHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		<p>2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpras dan Pilkada skala Kota.</p>		
		<p>3. Pengawasan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpras dan Pilkada skala Kota.</p>	<p>a. Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tingkat Kecamatan. b. Mengkoordinasi partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Niraba lainnya lingkup Kecamatan. c. Menertitikan surat keterangan domisili partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Niraba lainnya lingkup Kecamatan. d. Rekapitulasi data sosial ekonomi, seni dan budaya dalam mendukung Bandung kondusif lingkup Kecamatan.</p>	



#### 1.4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tahun 2019 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan lptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, sebagai berikut :



1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis.

Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Mandalajati dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Mandalajati, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 80 %;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70 %;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD;
5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Mandalajati, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.



### **1.5. Landasan Hukum**

Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Mandalajati Triwulan 4 Tahun 2019 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019 - 2023.

### **1.6. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi**

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu : SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan Pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor 900/08-Kec.Mdljt Tanggal 21 Januari 2019 , Sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Standard Operational Procedure  
Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan  
Pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019

No	URAIAN KEGIATAN	CAMAT	SEICAM	SUNDRAM	STAFF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Mengumpulkan data dari Lurah dan Kasi Kecamatan					Eviden dari Lurah dan Kasi Kecamatan	Tgl 1-3 awal Triwulan	Terhimpunnya eviden	
2	Memeriksa kelengkapan data sesuai dengan kriteria IKU Camat					Eviden Lengkap	30 Menit	Tersedianya eviden yang valid	
3	Menganalisa data untuk capaian target IKU Camat sebagai bahan analisis LKIP					Laptop, Eviden, LKIP Triwulan lalu	8 jam	Analisa sasaran, Mbi, Indikator	
4	Membuat Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulanan Kecamatan dan melaporkan ke Seicam					Meski analisa	3 jam	Draft LKIP	
5	Seicam memeriksa draft LKIP Triwulanan dan menyerahkan ke Camat					Draft LKIP	3 jam	Narasi LKIP	
6	Camat menandatangani LKIP Triwulanan					Narasi LKIP	30 Menit	LKIP Triwulanan	

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019.

### 1.7. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

#### **BAB II          PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis



**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV PENUTUP**

**LAMPIRAN**





---

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019-2023 tanggal 17 Desember 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD,



sehingga dokumen Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **2.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Mandalajati Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran strategis.

Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Mandalajati Kota Bandung sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Mandalajati Kota Bandung**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	1.1.1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	1.1.1.1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	80	81	82	83	84
				1.1.1.2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	100	100	100	100
			1.1.2. Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.1.2.1. Persentase Kelurahan Unggul	50	75	75	100	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	2.1. Tingkat Dukungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepada Program Program Pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	2.1.1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	2.1.1.1. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	75	77	78	79	80

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019.

### 2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui



Keputusan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Nilai Rata-Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	Persentase temuan yang ditindaklanjuti tepat waktu terhadap jumlah temuan
3	Persentase Kelurahan Unggul	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan dengan kriteria, sbb : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan- Ada program kerja- Mengikuti pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat</li><li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alrm waktu sholat</li><li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) - SK / SP- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li><li>4. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</li><li>5. Ruas Jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) -Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan - Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan - Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan - Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblase - Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak</li></ol>



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
		ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering - Melakukan penyiraman pada musim kemarau
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	Rata rata % RW Unggul + PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
				TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Nilai	75.6	77.00	78.40	80.00



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
				TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
	Kecamatan Mandalajati	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	0	0	0	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	0	0	0	50
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	0	0	0	17.92

### 2.5. Perencanaan Anggaran Tahun 2019

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 11 (sebelas) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 15.494.662.405,

**Tabel 2.4**  
**Anggaran Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2019
1	Sasaran 1	92	7.097.236.012
2	Sasaran 2	15	2.013.635.986
3	Sasaran 3	26	6.653.475.891
	Jumlah	133	15.764.347.889



pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tanggal 31 Januari 2019 yang telah direvisi melalui Surat Keputusan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tanggal 02 September 2019. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Mandalajati Kota Bandung**  
**Triwulan 4 Tahun 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	80	80.05	100.06
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	100	100.00
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50	75	150.00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	17.92	26.90	150.11

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati, dengan capaian kinerja triwulan 100.06 %, pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja triwulan 150 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan, dengan capaian kinerja triwulan 150.11 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu, dengan capaian kinerja triwulan 100 %.





## B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Triwulan 4 Tahun 2019

Secara umum Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

### Capaian Indikator Kinerja Strategis

#### Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 Triwulan 4

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	80	80.05	100.06
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	100	100.00
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50	75	150.00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	17.92	26.90	150.11



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	75.00 %
2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	3	75.00	1	25.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75.00</b>	<b>1</b>	<b>25.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>4</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	75.00 %



2	Sesuai Target	1	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1 Triwulan 4 Tahun 2019**  
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan**  
**Mandalajati**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Indeks	75.8	75.5	99.87	77	77.04	100.05	78.40	78.42	100.03	80	80.05	100.06
2	Persentase temuan BPK/inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	0	-	0.00	0	-	0.00	0	-	0.00	100	100	100.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati

<b>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</b>	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Mandalajati merupakan sasaran yang mendukung ketercapaian misi ke 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dan merupakan tugas dan fungsi dari kecamatan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran 1 ini mempunyai 2 indikator, yaitu : 1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu
<b>Instrumen atau cara pengukuran Indikator</b>	1. Instrumen Pengukurannya dengan menggunakan 9 unsur sesuai Permenpan 14 Tahun 2017. Pedoman umum ini diterapkan terhadap seluruh unit pelayanan yang ada di Kecamatan Mandalajati, sebagai instrumen penilaian dan



	<p>evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing</p> <p>Menghitung persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu terhadap jumlah temuan</p>
<b>Kinerja nyata dengan Rencana</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Capaian kinerja nyata indikator rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati adalah sebesar 80.05 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019, persentase capaian kerjanya adalah 100.06% atau capaiannya melebihi/melapau target yang telah diperjanjikan sebesar 0.06 %</li><li>2. Capaian kinerja indikator presentasi temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019. Persentase capaian kerjanya adalah 100% atau capaiannya sesuai target yang telah diperjanjikan.</li></ol>
<b>Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Capaian kinerja nyata indikator Rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati sebesar 80,05 dari target sebesar 80 Tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pengukuran IKM nya berbeda dengan tahun 2018</li></ol> <p>Capaian kinerja nyata indikator presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun 2018 tidak pernah dilakukan pengukuran indikator ini.</p>
<b>Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Capaian kinerja nyata indikator rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati adalah sebesar 80.05 bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 84 maka persentase capaian sebesar 95.30%</li></ol> <p>Capaian kinerja nyata indikator presentasi temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah sebesar 100% bila dibandingkan dengan</p>



	target akhir renstra sebesar 100% maka persentase capaian sebesar 1%
<b>Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya</b>	<p>1. Capaian kinerja indikator rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati adalah sebesar 80.05 dari target akhir tahun sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019 dengan tingkat capaian 100.06% bila dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis atau Kecamatan Arcamanik yang memiliki target 80 dengan realisasi sebesar 80.69. dengan tingkat capaian 100.86%. Kecamatan Mandalajati memiliki capaian lebih rendah sebesar 0.8%</p> <p>Capaian kinerja indikator presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah sebesar 100% dari target akhir tahun sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019 dengan tingkat capaian 100.06% bila dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis atau Kecamatan Arcamanik yang memiliki target 100% dengan realisasi sebesar 100%. dengan tingkat capaian 1%. Kecamatan Mandalajati memiliki capaian sama dengan Kecamatan Arcamanik</p>
<b>Output program/kegiatan dan keuangan</b>	<p>1. Rata rata Indeks kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan Mandalajati sebesar 80.05 dan presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 100% dengan anggaran sebagai pendukung capaian kinerja yang terserap sebesar Rp. 6.694.466.966</p>
<b>Faktor pendukung</b>	Dukungan sarana pelayanan sudah cukup memadai dalam mengakomodir kebutuhan dari pengguna pelayanan maupun peraturan perundang undangan.
<b>Faktor Penghambat</b>	<p>Faktor yang menjadi penghambat penurunan beberapa rata rata Indeks kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan Mandalajati yang dominan adalah penanganan pelayanan pengaduan. Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan unsur penanganan pelayanan pengaduan antara lain :</p> <p>Penyelesaian KTP tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam SOP hal ini disebabkan</p>



	kurangnya keping KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
<b>Solusi</b>	<p>Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan /solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perbaikan SOP.</li> <li>2. Peningkatan sosialisasi dari ASN maupun pengurus RT RW diwilayah Kecamatan Mandalajati terkait dengan pelayanan pembuatan KTP.</li> </ol>

<b>Sasaran 2</b>
Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2 Triwulan 4 Tahun 2019**  
**Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	0	-	0.00	0	-	0.00	0	-	0.00	50	75	150.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

<b>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</b>	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan merupakan sasaran yang mendukung ketercapaian misi ke 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan. Indikator sasaran 2 ini adalah Persentase Kelurahan Unggul.
--	---



<b>Instrumen atau cara pengukuran Indikator</b>	<p>Instrumen Pengukurannya adalah Persentase kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan. Adapun kriteria Kelurahan Unggul adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)</li><li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos)</li><li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</li><li>4. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</li></ol> <p>Ruas Jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p>
<b>Kinerja nyata dengan Rencana</b>	Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 75% dari target sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019, persentase capaian kinerjanya adalah 150% atau capaiannya melebihi/melapau target yang telah diperjanjikan sebesar 50 %
<b>Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya</b>	Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 75% dari target sebesar 50% tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun 2018 tidak pernah dilakukan pengukuran indikator ini.
<b>Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan</b>	Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 75% bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100% maka persentase capaian sebesar 75%
<b>Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya</b>	Capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 75% dari target akhir tahun sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019 dengan tingkat capaian 150% bila dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis atau Kecamatan Antapani yang memiliki target 50% dengan realisasi sebesar 50%. dengan tingkat capaian 100%. Kecamatan Mandalajati memiliki capaian lebih tinggi sebesar 50%
<b>Output program/kegiatan dan keuangan</b>	Kelurahan Unggul yaitu Kelurahan Sindangjaya, Jatihandap dan Karang Pamulang dengan anggaran sebagai pendukung capaian kinerja yang terserap sebesar Rp. 1.868.825.745





<b>Faktor pendukung</b>	Dukungan dan peran aktif dari para Lurah dan Stafnya dalam mensosialisasikan dan mewujudkan 5 kriteria kelurahan unggul.
<b>Faktor Penghambat</b>	Faktor yang menjadi penghambat tercapainya kriteria kelurahan unggul adalah <ol style="list-style-type: none"><li>1. minimnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan</li><li>2. kurangnya komitmen pimpinan untuk merealisasikan dengan maksimal sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.</li><li>3. Kurangnya sosialisasi mengenai kriteria kelurahan unggul kepada pihak kelurahan</li></ol>
<b>Solusi</b>	Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan /solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memotivasi kelurahan untuk dapat mewujudkan kriteria kelurahan unggul dengan anggaran seadanya</li><li>2. Melakukan sosialisasi yang intensif mengenai kriteria kelurahan unggul kepada pihak kelurahan</li></ol>

**Sasaran 3****Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3 Triwulan 4 Tahun 2019**  
**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase sub kegiatan RW Unggul terrealisasi	%	0	-	0.00	0	-	0.00	40	61.60	154	55	64.39	117.07
2	Persentase sub kegiatan PKK Unggul terrealisasi	%	0	-	0.00	0	-	0.00	25	57.14	228.56	38	59.18	155.74
3	Persentase sub kegiatan Karang Taruna Unggul terrealisasi	%	0	-	0.00	0	-	0.00	25	40.74	162.96	38	44.12	116.11
4	Persentase sub kegiatan LPM Unggul terrealisasi	%	0	-	0.00	0	-	0.00	25	37.93	151.72	38	40	105.26

**Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat**

<b>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</b>	Program Pemberdayaan dan Inovasi Kemasyarakatan merupakan Janji Wali Kota dalam Pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
<b>Instrumen atau cara pengukuran indikator</b>	Instrumen Pengukurannya adalah 1. persentase sub kegiatan RW unggul yang terrealisasi 2. persentase sub kegiatan PKK unggul yang terrealisasi 3. persentase sub kegiatan Karang Taruna unggul yang terrealisasi 4. persentase sub kegiatan LPM unggul yang terrealisasi
<b>Kinerja nyata dengan Rencana</b>	Kinerja nyata indikator : 1. persentase sub kegiatan RW unggul yang terrealisasi sampai dengan TW. 4 adalah 64.39% dari target 55% yang direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 117.07% 2. persentase sub kegiatan PKK unggul yang terrealisasi TW. 4 adalah 59.18% dari target 38% yang direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 155.74%



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. persentase sub kegiatan Karang Taruna unggul yang terrealisasi TW. 4 adalah 44.12% dari target 38% yang direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 116.11%</li><li>4. persentase sub kegiatan LPM unggul yang terrealisasi adalah 40% dari target 38% yang direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 105.26%</li></ol>
<b>Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya</b>	<p>Kinerja nyata indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. persentase sub kegiatan RW unggul yang terrealisasi sampai dengan TW. 4 adalah 64.39% jika dibandingkan dengan realisasi TW 3 sebesar 61.60% dengan capaian kinerja %</li><li>2. persentase sub kegiatan PKK unggul yang terrealisasi TW. 4 adalah 59.18% jika dibandingkan dengan realisasi TW 3 sebesar 57.14% dengan capaian kinerja 103.57%</li><li>3. persentase sub kegiatan Karang Taruna unggul yang terrealisasi TW. 4 adalah 44.12% jika dibandingkan dengan realisasi TW 3 sebesar 40.74% dengan capaian kinerja 108.30%</li><li>4. persentase sub kegiatan LPM unggul yang terrealisasi adalah 40% jika dibandingkan dengan realisasi TW 3 sebesar 37.93% dengan capaian kinerja 105.46%</li></ol>
<b>Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan</b>	<p>Kinerja nyata indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. persentase sub kegiatan RW unggul yang terrealisasi sampai dengan TW. 4 adalah 64.39% dari target 55% yang direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 117.07%</li><li>2. persentase sub kegiatan PKK unggul yang terrealisasi TW. 4 adalah 59.18% dari target 38% yang direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 155.74%</li><li>3. persentase sub kegiatan Karang Taruna unggul yang terrealisasi TW. 4 adalah 44.12% dari target 38% yang direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 116.11%</li><li>4. persentase sub kegiatan LPM unggul yang terrealisasi adalah 40% dari target 38% yang direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 105.26%</li></ol>
<b>Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya</b>	<p>Capaian kinerja nyata indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. persentase sub kegiatan RW unggul yang terrealisasi sampai dengan TW. 4 adalah 64.39% dari target 55% yang direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 117.07%</li><li>2. persentase sub kegiatan PKK unggul yang terrealisasi TW. 4 adalah 59.18% dari target 38% yang</li></ol>



	<p>direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 155.74%</p> <ol style="list-style-type: none"><li>persentase sub kegiatan Karang Taruna unggul yang terrealisasi TW. 4 adalah 44.12% dari target 38% yang direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 116.11%</li><li>persentase sub kegiatan LPM unggul yang terrealisasi adalah 40% dari target 38% yang direncanakan dalam KPI Tahun 2019 dengan capaian kinerja 105.26%</li></ol> <p>bila dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis atau kecamatan lain belum dapat dibandingkan karena tidak memiliki data</p>
<b>Output program/kegiatan dan keuangan</b>	<p>Capaian kinerja nyata indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>sub kegiatan RW unggul yang terrealisasi sampai dengan TW. 4 adalah 217 dari 377 sub kegiatan</li><li>persentase sub kegiatan PKK unggul yang terrealisasi sampai dengan TW. 4 adalah 29 dari 49 sub kegiatan</li><li>persentase sub kegiatan Karang Taruna unggul yang terrealisasi sampai dengan TW. 4 adalah 15 dari 34 sub kegiatan</li><li>persentase sub kegiatan LPM unggul yang terrealisasi sampai dengan TW 4 adalah 16 dari 40 sub kegiatan</li></ol> <p>dengan anggaran sebagai pendukung capaian kinerja yang telah terserap sebesar Rp. 6.511.203.862</p>
<b>Faktor pendukung</b>	<p>Ada pergeseran anggaran pada bulan februari 2019 untuk merubah rencana penganggaran supaya dapat menunjang program unggul pemerintah serta RPJMD</p>
<b>Faktor Penghambat</b>	<p>Adanya perubahan formulasi perhitungan tingkat pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan unggul</p>
<b>Solusi</b>	<p>Sosialisasi kepada PPTK, mengenai cara perhitungan tingkat pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan</p>



---

## BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2019 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2019 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung 2019. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2019 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2019 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.03 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 150.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 150.11 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.03 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 150.00 %



- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 150.11 %

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2019 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 17 Januari 2019

  
**CAMAT MANDALAJATI**  
KECAMATAN  
MANDALAJATI  
Drs. PEPEN EFENDI, M.Si  
NIP. 19620204 198603 1 016